**PERAN OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR) DALAM MENANGGULANGI
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DI MALI**

Oleh : Aris Perdana

arisperdana090698@gmail.com

Pembimbing: Faisyal Rani S.IP, MA,

Bibliografi: 1 Jurnal, 3 Buku, 13 Website dan artikel

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

This research is an study into international political which aims specifically to discusses the role of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), in dealing with ethnic conflicts between the Dogon and Fulani tribes in Mali country. Ethnic conflict is relevant to international relations insofar as it impacts human rights, security, and the economies of the in volved. Based on a number of cases, ethnic tensions ethnic trigger more conflicts than religious or cultural problems. Because ethnicity is very sensitive and often used as a tool to achieve political or economic interests.

This research uses the perspective of pluralism and international organizational theory to attempt to understand the role of the OHCHR in solving human rights issues in Mali. The level of analysis in this study uses a group behaviour approach to analyze how the activities of individuals or organizations involved in international relations. This basic framework is needed to help the define appropriate goals and direc analysis.

In this study, the author want to describe the actions taken by OHCHR to help resolve the human rights issues in the Dogon and Fulani ethnic conflicts in Mali in accordance with their role as international organizations.

Keywords: Conflict Ethnic, Human Right, International Organization, OHCHR

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan suatu kajian politik Internasional yang memfokuskan mengenai peran sebuah Organisasi internasional dalam membantu menangani situasi konflik antar etnisitas. Penelitian ini membahas mengenai peran dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* dalam membantu

menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Mali terkait konflik etnis antara suku Dogon dan suku Fulani.

Kajian tentang konflik etnis dalam ilmu hubungan internasional sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan konflik etnis menyangkut hak asasi manusia, keamanan, dan perekonomian negara yang sedang berkonflik. Dari beberapa kasus yang dialami oleh

negara-negara di dunia, masalah etnislah yang biasanya lebih banyak memicu konflik dibandingkan masalah agama dan budaya. Perbedaan antar etnis dapat menimbulkan perilaku selalu berburuk sangka terhadap kelompok atau etnis yang lainnya serta perilaku negatif lainnya dengan tindakan secara langsung seperti tindakan diskriminatif yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Kedua jenis tindakan ini atau beberapa tindakan negatif lainnya dapat menyebabkan potensi konflik antar kelompok etnis.

Ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi didominasi oleh militer eksternal, namun oleh ancaman bersifat *soft threat* yaitu dalam bentuk pertikaian ras dan etnis.¹ Salah satu bentuk masalah keamanan Transnasional ialah pertikaian antar etnis yang dapat berkembang menjadi konflik antar negara. Apabila etnis yang sedang bertikai meminta bantuan dari etnis yang sama di negara lain untuk membantu perjuangan mereka, baik untuk melepaskan diri dari negara tersebut kemudian bergabung dengan kelompok etnisnya di negara lain atau untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan sendiri.²

Negara Mali adalah dari kesekian banyaknya negara-negara di benua Afrika yang bermasalah di dalam tubuh pemerintahannya. Republik Mali yang pernah dianggap negara paling demokratis di Afrika yang sebenarnya adalah sebuah

negara bekas jajahan Prancis. Mali merdeka pada tahun 1960, hingga pada akhirnya Prancis mengakui kemerdekaan Mali yaitu tanggal 22 September. Namun kini, tak banyak yang tersisa dari demokrasi itu. Kudeta militer yang menggulingkan presiden, terhitung sebagai salah satu penyebab perkembangan konflik ini.³

Awal kudeta di mulai pada maret 2012, militer Mali merebut kekuasaan dari Presiden Amadou Toumani Touré. Dengan alasan Touré tak mampu mengatasi krisis dan pemberontakan kaum Tuareg di Mali utara. Akibat ketidak stabilan pasca kudeta, tiga kota terbesar di Mali utara Kidal, Gao, dan Timbuktu dikuasai pemberontak selama tiga hari berturut-turut. National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA),

organisasi yang berjuang menjadikan Azawad tanah air bagi suku Tuareg, kelompok ini berhasil mengambil alih kawasan tersebut pada April 2012. Pada 2015 lalu, pemerintah Mali telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok bersenjata. Sayangnya, kelompok ini tetap aktif dan sebagian besar wilayah di negara itu tetap berjalan tanpa hukum.⁴ MNLA awalnya dibantu oleh

³ Peter Heine, mantan Professor di Universitas Humboldt, Berlin. 2015.

⁴ Tim. "Ratusan Tewas dalam Serangan Pemburu Dogon di Mali," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190324103619-127-380135/ratusan-tewas-dalam-serangan-pemburu-dogon-di-mali> (diakses 24 Maret 2019).

¹ Kenneth Cristie, *Introduction: the problem with ethnicity and 'tribal' politics* (Richmond: Curzon, 1998), 2.

² Donal L. Horowitz, "self-determination: politic, philosophy, and law," in *ethnicity and group right*, ed. J. Schapiro & W. Kymlicra (NYU press, 1997), 429.

kelompok Islamis Ansar Dine yang masih ada kaitannya dengan kelompok Al-Qaeda. Setelah militer Mali diusir dari Azawad, Ansar Dine mulai memberlakukan hukum syariah ketat. Kaum Tuareg yang sudah puluhan tahun merasa dilupakan oleh pemerintah Mali di Bamako, kemudian dikhianati oleh kelompok ini yang gencar meluaskan kekuasaannya sendiri sehingga kelompok Tuareg akhirnya kehilangan pengaruh. Dengan dalih pemberontakan inilah menjadi awal dari konflik antar suku di negara Mali, karena dengan menjadikan isu agama dan minoritas sebagai alat untuk menjatuhkan salah satu di antaranya.

ETNIS DOGON DAN FULANI

Wilayah Mopti di Mali Tengah dihuni oleh dua komunitas utama yaitu Fulani yang sebagian besar adalah penggembala dan Dogon yang sebagian besar adalah petani. Meskipun mereka hidup berdampingan secara damai, akan tetapi sering terjadi ketegangan mengenai perebutan sumber daya.⁵ Biasanya yang sering terjadi konflik adalah etnis Fulani dan Dogon dibandingkan dengan etnis-etnis yang lain, karena Fulani dan Dogon sering memperebutkan sumber air untuk kebutuhan ternak dan tanaman mereka.

Fulani adalah kelompok penggembala ternak utama Afrika

⁵ Niagale Bagayoko, "Masters of the land – Competing customary and legal systems for resource management in the conflicting environment of the Mopti region, Central Mali, The Broker", <https://www.thebrokeronline.eu/masters-of-the-land-d40/> (diakses pada 27 November 2019)

barat. Kelompok ini biasanya melakukan Nomaden sehingga mereka banyak tersebar di seluruh bagian Afrika barat, akan tetapi di masing-masing negara kelompok mereka merupakan minoritas.⁶ Menggembala ternak biasanya merupakan pekerjaan bagi para laki-laki, sedangkan para wanita memerah susu dan membantu merawat ternak. Para wanita juga berternak kecil juga seperti unggas, mengolah kebun, membawa susu dari hasil perahan dan keju ke pasar lokal untuk dijual. Fulani di Mali hampir sepenuhnya Muslim, untuk mengajari anak-anak mereka tentang agama Islam sudah terdapat beberapa desa Fulani yang mendirikan sekolah-sekolah Islam.⁷

Sedangkan Dogon adalah suku petani dengan keyakinan Voodoo Afrika. Mereka telah tinggal di Mali bagian tengah selama berabad-abad. Wilayah mereka sudah termasuk dalam warisan dunia UNESCO. Dogon adalah nama tempat sekaligus nama suku yang dulu hidup di jaman purbakala. Suku ini menempati daerah Plato, bagian selatan Sungai Niger. Situs yang sudah ada sejak jaman dahulu ini ternyata masih ditinggali oleh para penduduk sukunya. Saat ini, suku Dogon memiliki penduduk sekitar 800 ribu jiwa. Berbeda dengan suku fulani yang mata pencaharian mereka sebagai penggembala, suku Dogon yang sebagian besar adalah bertani untuk kehidupan mereka sehari-hari.

⁶ Kate R. Hampshire, "Fulani", *Ember Journal*, vol. 2, 2003.

⁷ Joshua Project, "Fulani, Maasina in Mali", https://joshuaproject.net/people_groups/11773/ML, (diakses pada 27 November 2019)

Dogon yang secara tradisional mengelola produksi biji-bijian dan sayuran seperti bawang merah. Selain untuk di jual, produksi sayuran juga dikelola oleh individu.

PEMBAHASAN

Mali sekarang sedang tidak stabil dengan konflik internal mereka, dimulai dengan kudeta di Mali utara hingga serangkaian serangan antara komunitas suku Fulani dan Dogon.⁸ Kecenderungan peningkatan kekerasan di Mali tengah yang terjadi antara penggembala Fulani dan petani Dogon telah dipicu oleh tuduhan bahwa suku Fulani sering membawa ternak mereka untuk merumput di wilayah Dogon serta perselisihan tanah dan sumber air. Orang-orang Dogon sering menuduh Fulani membawa ternak mereka ke pertanian Dogon dan merusak hasil panen mereka.

Fulani juga dituduh bekerja sama dengan kelompok jihadis yang menyerang desa-desa Dogon dan mencegah untuk mengolah tanah milik mereka. Sedangkan Fulani menuduh Dogon membunuh dan mencuri ternak mereka dan juga menuduh bahwa Dogon berkolaborasi dengan militer Mali untuk menyerang mereka. Konflik ini secara historis menyebabkan ketegangan dan kadang-kadang kekerasan antar kelompok, tetapi

⁸ Daniel Davis, "Political chaos in Mali: Fulani, Dogon and Tuareg, INSIDE OVER", <https://www.insideover.com/terrorism/political-chaos-in-mali-fulani-dogon-and-tuareg-tribal-clashes-continue.html>, (diakses pada 27 November 2019).

persaingan atas sumber daya sering diselesaikan dengan negosiasi.

Konflik militan Islam yang dimulai di Mali utara pada tahun 2012 dan menyebar ke daerah-daerah pusat pada tahun 2015 membawa lebih banyak ketidakstabilan dan kurangnya kontrol pemerintah ke wilayah tersebut. Sejak 2015 kontrol pemerintah di Mopti telah melemah, yang berarti orang tidak merasa dapat mengandalkan otoritas.⁹ Di wilayah Mopti, Mali tengah, terjadi kekerasan secara langsung.

Pada tahun 2018 telah menewaskan lebih dari 200 warga sipil, mengusir ribuan orang dari rumah mereka, merusak mata pencaharian, dan menyebabkan kelaparan yang meluas. Para korban sebagian besar adalah etnis Fulani yang ditargetkan oleh etnis Dogon atas dugaan dukungan mereka terhadap kelompok Islam bersenjata yang sebagian besar terkait dengan AQIM. *Human Rights Watch* (HRW) melaporkan bahwa pada tanggal 05 April 2018, 14 pria Fulani yang diduga terorisme dibunuh oleh Angkatan Bersenjata Mali (FAMA). FAMA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa 14 orang telah tewas ketika berusaha melarikan diri namun, para saksi percaya bahwa orang-orang ini dieksekusi oleh FAMA.

Pada 19 Mei 2018, sebuah batalion Mali *G5 Sahel Joint Force* yang ditugaskan, dengan cepat dan

⁹ BBC, "Mali attack: Behind the Dogon-Fulani violence in Mopti", <https://www.bbc.co.uk/world-africa-47694445>, (diakses pada 27 November 2019).

sewenang-wenang mengeksekusi 12 warga sipil di pasar ternak Boulikessi sebagai tindakan pembalasan. Etnis Fulani di pusat Mopti dan Segou juga melaporkan pelecehan dan kekerasan oleh pasukan pemerintah pada saat merayakan upacara pembaptisan, kesaksian HRW, tujuh pria Fulani ditangkap.

Pada 02 Januari 2019, orang-orang bersenjata yang diyakini sebagai pemburu tradisional Dogon membunuh 37 penggembala Fulani di sebuah desa Mali tengah. Pembantaian juga terjadi pada 23 Maret 2019 terhadap 160 warga Fulani. Pembunuhan ini dilakukan oleh etnis Dogon, dan banyak rumah dibakar di desa Koulogon yang sebagian besar dihuni oleh etnis Fulani. Serangan itu terjadi sekitar waktu panggilan pertama untuk berdoa tahun 2019.¹⁰ Pada 09 Juni 2019 Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas dalam serangan terhadap sebuah desa Fulani. Pembunuhan oleh para pemburu tradisional dicurigai sebagai pemburu dari komunitas Dogon di Ogossagou yang di kenal dengan kelompok Dan Na Ambassogou.¹¹

Suku Dogon membentuk kelompok perlawanan bernama Dan Na Ambassagou yang berarti

¹⁰John Pike, "Fulani-Dogon Conflict", <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/fulani-dogon.htm>, (diakses pada 28 November 2019).

¹¹ Global Security, "Fulani-Dogon Conflict", <https://www.globalsecurity.org/world/war/>, (diakses pada 29 November 2019).

"pemburu yang meyakini tuhan". Pemerintah setempat memberikan persenjataan kepada kelompok Ambassagou dengan tujuan untuk melawan teroris. Akan tetapi dalam perkembangannya Ambassagou lebih banyak menyakiti Fulani ketimbang teroris. Dari Juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan Ambassagou menggunakan dalih memberantas terorisme untuk melukai Fulani. Ada stigma di kalangan Ambassagou bahwa seluruh Fulani yang Muslim mendukung terorisme, sehingga kelompok ini melakukan tindakan penyerangan terhadap kelompok Fulani. Terhitung ratusan korban tewas dalam serangan brutal yang menargetkan etnis minoritas Fulani, yang dituduh memiliki hubungan dengan pemberontakan di Utara Mali.

PERAN OHCHR

Organisasi internasional sendiri dalam hubungan internasional telah diakui dan dianggap efektif dalam memecahkan konflik atau permasalahan suatu negara. Bahkan organisasi internasional sendiri dianggap mampu mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Keberadaan Organisasi internasional diperlukan dalam keadaan dimana negara tersebut tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah seperti isu politik dan ekonomi.

Organisasi Internasional yang bernaung dibawah PBB yaitu *Office of The High Commissioner* (OHCHR) adalah salah satu organisasi internasional memiliki peran penting dalam politik internasional. Isu-isu hak asasi manusia biasanya terabaikan karena isu-isu ekonomi dan politik lebih mendesak. Namun

organisasi internasional salah satunya OHCHR mengangkat isu HAM menjadi salah satu isu penting dalam politik global.

Saat ini yang sedang terjadi di negara Mali yaitu konflik antara etnis Fulani dan Dogon. Kedua etnis ini sudah sering terlibat konflik seputar perebutan air dan tuduhan perusakan lahan, dengan keberlanjutan konflik ini terjadilah pembantaian yang dilakukan etnis Dogon terhadap Fulani yang memakan korban hingga ratusan jiwa. Untuk itu OHCHR selaku badan HAM internasional di tuntut untuk berperan aktif memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan kemanusiaan, serta upaya-upaya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Mali kedepannya.

OHCHR Mengutus Tim Penyelidikan Terhadap Pelanggaran HAM.

OHCHR telah mengerahkan tim penyelidik yaitu petugas Hak Asasi Manusia dan tim ini akan melakukan wawancara di desa-desa yang terkena dampak untuk mencoba memastikan apa yang terjadi di lapangan. Dari tim penyelidik juga beranggapan bahwa baik pria, wanita, dan anak-anak dari komunitas Fulani sengaja sebelumnya sudah ditargetkan untuk di serang.¹²

Tim penyelidikan ini dikerahkan di desa Koulogon yaitu permukiman etnis Fulani guna mengumpulkan informasi dengan

melakukan wawancara individu secara langsung kepada korban dan kepada para saksi yang berada di sekitaran permukiman etnis Fulani yang menyaksikan secara langsung terjadinya penyerangan.

Sengketa kedua etnis ini yang sering kali di picu oleh perselisihan tentang akses tanah dan sumber air belakangan ini konflik berubah menjadi sangat mematikan, karena seluruh komunitas Fulani di pandang sebagai komunitas yang ekstrimis keras hanya karena mereka muslim. Para korban dilemparkan ke sumur-sumur dan rumah-rumah serta gudang-gudang dibakar, menghancurkan penghidupan seluruh masyarakat. Para pemburu tradisional Dogon melakukan penggerebekan di desa, mereka menggunakan senjata otomatis, senapan berburu dan senjata lainnya.

Meskipun Pemerintah telah membubarkan milisi Dan Nan Ambassagou yang diduga melakukan beberapa kekejaman, OHCHR tetap mendesak penyelidikan segera kepada pemerintah Mali terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan oleh semua kelompok. Sebelum terjadinya konflik Fulani dan Dogon yang terbesar saat ini, beberapa penyelidikan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang akan tetapi mereka sebagian besar gagal menghasilkan persidangan dan melanjutkan tindakan selanjutnya sesuai hukum. Sekarang banyak komunitas-komunitas yang lain selain dari Dogon dengan Dan Na Ambossogou nya yang menggunakan dalih sebagai komunitas atau kelompok pertahanan menggunakan wewenang yang salah serta melakukan tindakan main hakim sendiri untuk menyingkirkan apa

¹² UN news, <https://news.un.org/en/story/2019/03/1035481>, (diakses 16 Desember 2019).

yang dianggap sebagai ancaman bagi mereka seperti ekstrimisme.

OHCHR Mengeluarkan Laporan Pelanggaran HAM di Mali

OHCHR mengeluarkan laporan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di pemerintahan Mali. Pada skripsi ini penulis menjelaskan dua bentuk laporan dari OHCHR mengenai pelanggaran HAM yang melibatkan perselisihan antara etnis Dogon dan Fulani yang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Januari dan Juni pada tahun 2019.

Informasi yang dikumpulkan dan dijelaskan dalam laporan ini didasarkan pada investigasi yang dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dari tanggal 1 hingga 6 Januari dari Bamako dan Mopti, OHCHR mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi dan tuduhan yang diterima berkaitan dengan serangan, termasuk berbagai laporan internal, sumber terbuka seperti jejaring sosial dan media foto, video yang tersedia di berbagai tempat. Penyelidikan ini juga termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.¹³

Pada 1 Januari OHCHR menerima laporan bahwa terjadi serangan di desa Koulogon permukiman etnis Fulani yang menyebabkan pelanggaran HAM berat yaitu pembunuhan. Kedua, pada 7 dan 8 Januari, pembentukan fakta-fakta dikerahkan ke desa Koulogon dan untuk mengumpulkan informasi. Selama dua hari ini, tim penyelidik

melakukan wawancara individu dengan sumber langsung yaitu saksi mata.

Dari laporan tim penyelidik OHCHR penyerangan yang dilakukan kelompok Dogon ini juga berlanjut pada awal tahun 2019, dengan wawancara para saksi yang melihat secara langsung insiden penyerangan yang dilakukan kelompok pemburu Dogon yaitu Dan Na Ambassogou dengan seratus pasukan mendatangi desa Fulani membawa berbagai senjata dan juga membakar 173 pondok dan 59 dari 61 lumbung dari desa, atau hampir 80% bangunan di desa. Mereka juga diduga mencuri ternak dan barang-barang pribadi milik Fulani seperti perhiasan dan kendaraan yang di miliki warga.

Sedangkan pada periode 10 Juni 2019, petugas HAM dari kantor Mopti dan Bamako mengumpulkan dan menganalisis informasi awal dari sumber primer dan sekunder, termasuk laporan panggilan yang diterima melalui *Call Center*. Tim petugas Hak Asasi Manusia lainnya memantau dan meninjau media sosial, dan mengumpulkan serta menganalisis publikasi, gambar, video, dan file audio yang tersedia. Berbagai pernyataan dikeluarkan setelah serangan itu, termasuk siaran pers dari pemerintah Mali dan organisasi serta asosiasi sosial budaya, serta laporan dari lembaga dan organisasi kemanusiaan, juga diperhitungkan.¹⁴

¹³OHCHR, report koulongo, OHCHR website, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ML/RapportKoulongo.pdf>, (diakses 18 Desember 2019).

¹⁴OHCHR, Public Report Sobane, OHCHR website, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ML/Public_report_SobaneDa.pdf, (diakses 18 Desember 2019).

Pada tanggal 12 Juni, tim dikerahkan ke desa Sobane Da untuk menyelidiki dan menguatkan informasi awal dan dugaan lainnya. Terlepas dari pemindahan sebagian besar penduduk desa, tim ini mampu mewawancarai para penyintas dan saksi langsung lainnya mengenai serangan yang masih ada di Sobane Da. Tim tersebut secara khusus menyelenggarakan wawancara kelompok dengan lebih dari 100 orang dan melakukan 18 wawancara perorangan dan rahasia dengan para penyintas dan saksi langsung dan tidak langsung lainnya, sesuai dengan metodologi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Tim juga mengunjungi bagian desa tempat mereka dimakamkan. Kekerasan bersenjata antar komunitas di Mali tengah terus menyebar dan melemahkan hidup bersama. Penting bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pusat peradilan khusus mengarah pada penuntutan para penulis.

Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa "Setiap permohonan kebencian terhadap kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan dilarang oleh hukum". Dalam hal ini negara Mali harus dengan tegas mengutuk dan mengambil langkah-langkah untuk melarang apa pun yang berkaitan untuk menghasut kebencian dan kekerasan.

Untuk mengakhiri siklus kekerasan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, DDHP MINUSMA membuat rekomendasi berikut.

Kepada Pemerintah Mali

- Memperkuat mekanisme negara untuk melindungi penduduk, khususnya perempuan dan anak-anak, orang-orang terlantar dan layanan sosial, yang semakin menjadi korban serangan bersenjata dan pembalasan yang terus menerus di Mali tengah.
- Ambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kekejaman.
- Memastikan bahwa penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung dilakukan dengan tekun dan tuntas dan bahwa para pelaku dibawa ke pengadilan yang sesuai.
- Melaksanakan keputusan yang diumumkan oleh Presiden Republik untuk pelucutan senjata elemen non-negara yang efektif dan segera yang terlibat dalam kekerasan yang dilakukan di Mali tengah
- Secara sistematis mengutuk dan menyelidiki hasutan untuk kebencian dan kekerasan, dan mengambil semua langkah yang tepat untuk melarang panggilan ini.
- Untuk Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali MINUSMA mendukung semua upaya pihak berwenang Mali sehubungan dengan rekomendasi yang dibuat di atas.¹⁵

OHCHR Memfasilitasi Pemerintah Mali dengan Organisasi Internasional Lainnya, agar dapat Memperoleh Bantuan Kemanusiaan.

Dalam kasus etnis Fulani, OHCHR menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui beberapa

¹⁵ Ibid

tindakan untuk memfasilitasi pemerintahan Mali dengan organisasi internasional lainnya, terutama dalam upaya memperoleh bantuan kemanusiaan kepada etnis Fulani yang menjadi korban dalam konflik.

Pertama, Salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada pemerintahan Mali adalah bantuan pangan dan sanitasi pada bulan Ramadhan Mei 2019. Tepat di hari pertama Ramadan ratusan pengungsi internal berkumpul di dekat kamp Faladie, kota Bamako, Mali, Afrika Barat. Seratus kepala keluarga bersiap menerima paket pangan dan paket sanitasi yang diantarkan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).¹⁶

Pendistribusian bingkisan di awal Ramadan ini merupakan hasil kolaborasi kemanusiaan antara ACT dan Kitabisa.com yang berasal dari Indonesia. Bantuan yang di berikan antaranya ada beras, gula, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, klorin, kelambu, ini semua dicukupkan untuk 100 kepala keluarga setiap paketnya.

Kedua, Pihak OHCHR juga telah melakukan usaha dengan memfasilitasi terjadinya kerja sama antara pemerintahan Mali dengan badan PBB lainnya seperti UNICEF. Untuk mengurangi dampak konflik, UNICEF di Mali mendukung pengembangan dan implementasi perencanaan kesiap siagaan dan respon cepat terhadap krisis kemanusiaan di setiap program OHCHR.

¹⁶ACT, riuh kebahagiaan pengungsi Mali saat terima bantuan ramadhan, ACT NEWS, <https://news.act.id/berita/riuh-kebahagiaan-pengungsi-mali-saat-terima-bantuan-ramadan>, (diakses 20 Desember 2019).

UNICEF mendukung Aksi Kemanusiaan serta entitas Pemerintah lainnya dan bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil seperti OCHA, WFP, UNHCR, dan IOM untuk menyediakan layanan sosial yang penting bagi masyarakat yang terkena dampak.¹⁷ Secara khusus, UNICEF Menanggapi krisis gizi melalui memberikan perawatan dan bantuan untuk kekurangan gizi akut, dan meningkatkan praktik kebersihan dan pemberian makan. Penyediaan air minum yang aman di tingkat masyarakat melalui truk air dan mendistribusikan peralatan untuk pengolahan air berbasis rumah serta konstruksi dan rehabilitasi titik air untuk akses air permanen. Pada 2019, UNICEF juga bertujuan untuk memberikan dukungan psikososial kepada lebih dari 92.000 anak perempuan dan laki-laki yang terkena dampak konflik.¹⁸

OHCHR Mendukung Rezim Internasional Melalui Kerjasama dengan MINUSMA dalam Menghadapi Pemberontak di Mali.

OHCHR sebagai badan Hak Asasi Manusia internasional berperan aktif dan memberikan banyak kontribusi untuk menyuarkan pelanggaran HAM yang terjadi di Mali. OHCHR juga bekerja sama dan mendukung *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*

¹⁷UNICEF, Humanitarian response, UNICEF website <https://www.unicef.org/mali/en/humanitarian-response> (diakses 6 Januari 2020).

¹⁸UNICEF, Sharp increase grave violation againts xhildren Mali, UNICEF website <https://www.unicef.org/mali/en/press-releases/sharp-increase-grave-violations-against-children-mali-warns-unicef> (diakses 6 Januari 2020).

(MINUSMA) yaitu misi penjaga perdamaian PBB untuk Mali untuk menyelesaikan permasalahan pemberontakan sesuai perannya sebagai badan HAM internasional.

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2295 (2016) dan 2364 (2017) yang meminta Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA) bersama OHCHR untuk memantau pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak-hak ini termasuk semua bentuk kekerasan seksual yang berbasis gender dan pelanggaran atau serangan yang dilakukan terhadap perempuan dan termasuk anak-anak di seluruh wilayah. Divisi ini telah memberikan perhatian khusus pada masalah Hak Asasi Manusia yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata ekstrimis yang menguasai wilayah utara Mali.

Berdasarkan mandat yang berasal dari Resolusi Dewan Keamanan, divisi ini mendukung otoritas Mali dengan pandangan untuk membawa ke pengadilan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat HAM terkait dengan proses menuju ke Perjanjian Perdamaian dan Rekonsiliasi yang dihasilkan dari proses (CSA). Dengan berfokus pada tema-tema penting, divisi ini memungkinkan untuk menempatkan masalah hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam proses perdamaian.

OHCHR sebagai organisasi internasional telah berperan dalam membantu rezim internasional. Selain menegakkan Hak Asasi Manusia OHCHR juga berperan membantu dan bekerja sama dengan

MINUSMA sebagai misi penjagaan keamanan PBB dalam menghadapi pemberontakan atau terorisme di Mali utara. Sejalan dengan *UN Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) yaitu Strategi Anti-Terrorisme Global PBB, Strategi ini berisi rekomendasi praktis dalam empat bidang utama:

- Mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme.
- Mencegah dan memberantas terorisme.
- Membangun kapasitas negara untuk mencegah dan memerangi terorisme dan untuk memperkuat peran sistem PBB.
- Memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan supremasi hukum saat melawan terorisme.¹⁹

Dari penjelasan di atas OHCHR dengan kerjasama dari MINUSMA melakukan investigasi dan mencari data-data terhadap pelanggaran HAM di Mali, yang mana dari data-data inilah dapat dijadikan rujukan bagi divisi atau badan-badan penegak keadilan lainnya untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Mali. Dengan keterlibatan OHCHR dalam menumpaskan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kelompok pemberontak sebagai faktor utama penyebab konflik antar komunal dengan tuduhan adanya kerjasama salah satu kelompok etnis dengan

¹⁹UNGCTS, UN global counter-terrorism strategy, <https://www.un.org/sc/ctc/resources/general-assembly/un-global-counter-terrorism-strategy/>, (diakses 6 Januari 2020).

pemberontak ini, dapat menyelesaikan konflik-konflik yang ada, karena dengan di berantasnya permasalahan pemberontak maka tidak ada lagi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok atau perselisihan antar etnis dengan tuduhan adanya kerja sama dari salah satu kelompok atau etnis dengan kelompok pemberontak.

Kesimpulan

Perselisihan dan konflik kedua etnis ini mendorong OHCHR sebagai organisasi internasional dan badan penegak HAM internasional untuk berperan aktif dalam menyelesaikan pembantaian terhadap minoritas suku Fulani di Mali yang dilakukan oleh kelompok Dogon. Kontribusi yang dilakukan oleh OHCHR sejalan dengan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Karen Mingst yaitu fungsi organisasi internasional menyediakan informasi dan pengawasan, memberikan kontribusi untuk terciptanya kerjasama antara negara dan aktor, memberikan bantuan dan pengawasan serta membantu rezim internasional.

Pada studi kasus ini OHCHR di Mali telah melakukan Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Mali khususnya konflik etnis Dogon dan Fulani, mengeluarkan laporan dan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, OHCHR memfasilitasi pemerintahan Mali dengan organisasi internasional lainnya agar dapat memperoleh bantuan, serta OHCHR membantu MINUSMA sebagai misi penjaga perdamaian PBB untuk Mali dalam memberantas pemberontak dan terorisme di Mali utara.

Hambatan juga menyertai perjalanan OHCHR selama bertugas dalam penyelesaian kasus HAM terhadap konflik etnis Dogon dan Fulani. Terbatasnya akses dan logistik, OHCHR tidak dapat mengunjungi beberapa desa Fulani yang terkena serangan dari etnis Dogon dan tempat para pengungsian bagi korban yang selamat di desa tersebut. Hambatan lainnya OHCHR kesulitan dalam menguatkan tuduhan penghilangan warga Fulani yang terjadi selama penyerangan yang dilakukan etnis Dogon, dikarenakan kurangnya data mana korban yang tewas pada saat penyerangan dan mana korban yang telah dibawa oleh pelaku. Pada saat itu juga pemindahan sebagian besar warga yang selamat dari penyerangan ke tempat pengungsian menjadi kesulitan bagi OHCHR untuk mengumpulkan data, dikarenakan terbatasnya akses dan logistik untuk mendatangi setiap desa-desa yang terkena serangan.

Sejauh ini OHCHR sudah sangat berperan aktif dalam membantu penyelesaian konflik atas pelanggaran HAM yang ada di dalam pemerintahan Mali, baik berkontribusi dalam penyelesaian pemberontakan di Mali utara maupun konflik lokal antara etnis Dogon dan Fulani. Keterlibatan OHCHR dalam membantu pemerintahan Mali memberikan dampak positif bagi masyarakat yang saat ini menjadi korban atas konflik yang terjadi. Peran OHCHR secara keseluruhan tidak hanya membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara etnis Dogon dan Fulani saja, tetapi juga bagaimana OHCHR memberika bimbingan, pelatihan dan pengarahan akan pentingnya Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Hampshire, Kate R. "Fulani", *Ember Journal*, vol. 2, 2003.

BUKU

Cristie, Kenneth, "Introduction: the problem with ethnicity and 'tribal' politics" dalam *kenneth cristie*), *ethnic conflict, tribal politic*. Richmond: Curzon, 1998.

Horowitz, Donal L. "Self-determination: politic, philosophy, and law," dalam J. Schapiro & W. Kymlicra (eds), *ethnicity and group right*. NYU press, 1997.

Heine, Peter, mantan Professor di Universitas Humboldt, Berlin

WEBSITE DAN ARTIKEL

ACT, riuh kebahagiaan pengungsi Mali saat terima bantuan ramadhan, ACT NEWS, <https://news.act.id/berita/riuh-kebahagiaan-pengungsi-mali-saat-terima-bantuan-ramadan>, (diakses 20 Desember 2019).

BBC, "'Mali attack: Behind the Dogon-Fulani violence in Mopti'", <https://www.bbc.co.uk/world-africa-47694445>, (diakses pada 27 November 2019).

Daniel Davis, "Political chaos in Mali: Fulani, Dogon and Tuareg,

INSIDE OVER", <https://www.insideover.com/errorism/political-chaos-in-mali-fulani-dogon-and-tuareg-tribal-clashes-continue.html>, (diakses pada 27 November 2019).

Global Security, "Fulani-Dogon Conflict", <https://www.globalsecurity.org/world/war>, (diakses pada 29 November 2019).

John Pike, "Fulani-Dogon Conflict", <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/fulani-dogon.htm>, (diakses pada 28 November 2019).

Joshua Project, "Fulani, Maasina in Mali", https://joshuaproject.net/people_groups/11773/ML, (diakses pada 27 November 2019)

NGCTS, UN global counter-terrorism strategy, <https://www.un.org/sc/ctc/resources/general-assembly/un-global-counter-terrorism-strategy/>, (diakses 6 Januari 2020).

Niagale Bagayoko, "Masters of the land – Competing customary and legal systems for resource management in the conflicting environment of the Mopti region, Central Mali, The Broker", <https://www.thebrokeronline.eu/masters-of-the-land-d40/> (diakses pada 27 November 2019)

OHCHR, Public Report Sobane, OHCHR website, <https://www.ohchr.org/Docu>

ments/Countries/ML/Public_report_SobaneDa.pdf, (diakses 18 Desember 2019).

OHCHR, report koulongo, OHCHR website, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ML/RapportKoulongo.pdf>, (diakses 18 Desember 2019).

UNICEF, Humanitarian response, UNICEF website <https://www.unicef.org/mali/en/humanitarian-response> (diakses 6 Januari 2020).

¹UNICEF, Sharp increase grave violation againts children Mali, UNICEF website

<https://www.unicef.org/mali/en/press-releases/sharp-increase-grave-violations-against-children-mali-warns-unicef> (diakses 6 Januari 2020).

UNnews, <https://news.un.org/en/story/2019/03/1035481>, (diakses 16 Desember 2019).

Tim. "Ratusan Tewas dalam Serangan Pemburu Dogon di Mali," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190324103619-127-380135/ratusan-tewas-dalam-serangan-pemburu-dogon-di-mali> (diakses 24 Maret 2019).